

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Ada tiga jenis bank yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Ketiga jenis bank ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing dalam kehidupan perekonomian di Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia ikut memainkan peranannya khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan semua kegiatan konvensional dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain. Sedangkan dalam memberikan dana kembali ke masyarakat Bank Perkreditan Rakyat menyalurkan dalam bentuk kredit.

Penyediaan dana oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat merupakan salah satu kegiatan aktif yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat akan menerima pendapatan bunga (*interest income*) dari kredit (pinjaman) yang diberikan dimana pendapatan bunga merupakan salah satu sumber penerimaan paling besar dan dominan bagi Bank Perkreditan Rakyat sehingga

kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dapat terus berlanjut sejalan dengan peningkatan kegiatan pemberian kredit.

Pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat merupakan kegiatan pokok operasional. Kegiatan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat tersebut tidak terlepas dari tujuan fundamental yaitu mencari keuntungan atau laba. Bank Perkreditan Rakyat harus dapat mengelola penyaluran dana dan penempatan dana tersebut secara optimal. Semakin baik cara pengelolanya maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh bank tersebut. Bank Perkreditan Rakyat harus hati-hati dan tidak sembarangan dalam pengelolaan kredit yang disalurkan sehingga jumlah kredit yang telah dicairkan sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan setelah dana kredit sampai ditangan nasabah (debitur) tidak akan menimbulkan kredit macet bagi Bank Perkreditan Rakyat karena kredit macet sangat mempengaruhi kondisi finansial Bank Perkreditan Rakyat.

Kredit macet dalam jumlah yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu, pihak Bank Perkreditan Rakyat harus melakukan penilaian kredit dengan tujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kredit hanya diberikan kepada calon debitur yang benar-benar pantas untuk menerimanya. Hal ini bertujuan agar kredit yang diberikan dapat mencapai tujuannya.

Untuk dapat meminimalisir resiko kredit atau kredit bermasalah, maka diperlukan penilaian sebelum pemberian kredit di perbankan dengan menggunakan analisis prinsip 5C yaitu *Character* (analisis yang digunakan untuk mengetahui watak atau sifat calon nasabah), *Capacity* (untuk mengetahui

kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit), *Capital* (kondisi kekayaan yang dimiliki calon debitur), *Condition of economi* (menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang), dan *Collateral* (penilaian jaminan yang diberikan oleh calon debitur). Analisis kredit perlu dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui seberapa besar resiko pinjaman macet, yang dilihat dari kesanggupan dan kesungguhan calon nasabah tersebut untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh bank sesuai dengan persyaratan. Analisis kredit ini juga dilakukan untuk mengetahui masa lalu calon nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan pada lembaga perbankan yang sebelumnya menangani usaha calon nasabah tersebut untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh bank sesuai dengan persyaratan.

Pengendalian intern kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan utama dari pengendalian intern kredit suatu bank adalah untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian intern yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Untuk mengatasi adanya kredit bermasalah maka dipandang perlu untuk melakukan analisis pengendalian intern sebelum dilakukannya suatu pemberian kredit.

Menurut Mulyadi menyatakan bahwa

Sistem pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹

Menurut Wing Wahyu Winarno, sistem pengendalian intern diartikan sebagai :

Rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen²

Sistem pengendalian intern menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) mengeluarkan definisi COSO tentang pengendalian internal. Definisi COSO tentang pengendalian intern sebagai berikut: sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut : efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Komponen-komponen pengendalian intern menurut COSO antara lain : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan (Monitoring).

¹ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2019, hal. 129

² Wing Wahyu Winarno, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006, hal. 114

Sistem pengendalian intern yang baik akan membantu kegiatan operasional bank secara sehat, serta untuk mengendalikan timbulnya kredit bermasalah. Agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan system, diperlukan suatu pengendalian intern suatu fungsi control dan pengendalian system tersebut sehingga system yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان adalah salah satu bank pengkreditan rakyat yang bergerak dibidang usaha menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito dan salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sistem pengendalian intern yang ada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان sebenarnya sudah baik, dengan menerapkan prosedur dan kebijakan dalam pemberian kredit. Namun di sisi lain terdapat masalah yang dialami BPR Solider Marelان. Kredit bermasalah ini digolongkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Adapun data jumlah pemberian kredit yang dicatat pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان pada tahun 2019 dan 2020

Table 1.1
Jumlah Pemberian Kredit
PT. BPR Solider Marelan Tahun 2019 dan 2020

Keterangan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit yang diberikan	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit yang diberikan
Kredit Lancar	252	Rp.11.366.000.000	248	Rp.11.074.304.017
Kredit Kurang Lancar	5	Rp.63.960.800	3	Rp.118.152.250
Kredit Diragukan	4	Rp.63.840.550	5	Rp.33.566.400
Kredit Macet	15	Rp.582.449.590	22	Rp.595.449.590
Total Kredit	276	Rp.12.076.250.940	278	Rp.11.821.472.257

Sumber : PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelan

Dari table 1.1 merupakan data jumlah pemberian kredit yang dimiliki PT. BPR Solider Marelan tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil perkembangan pertahunnya. Jumlah pemberian kredit kepada masyarakat tahun 2019 sebesar Rp.12.076.250.940,- dan tahun 2020 total pemberian kredit sebesar Rp.11.821.472.257,-. Dari total pemberian kredit tersebut terdapat pengembalian kredit yang dilakukan nasabah BPR yaitu kredit lancar pada tahun 2019 sebesar Rp.11.366.000.000,- dan terdapat jumlah Pemberian kredit macet sebesar Rp.582.449.590,- Dan pada tahun 2020 jumlah kredit lancar sebesar Rp. 11.074.304.017,- dan terdapat jumlah kredit macet sebesar Rp. 595.449.590,-. Pada tahun 2019 dari jumlah kredit yang diberikan terdapat *Non Performing Loan* (kredit yang menunggak melebihi dari 90 hari) yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet sebesar Rp.710.250.940, dengan rasio *Non Performing Loan* sebesar 5,88%. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat NPL

yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet sebesar Rp.747.168.240, dengan rasio *Non Performing Loan* sebesar 6,32% dari jumlah kredit yang diberikan. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tingkat kenaikan NPL dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 5,88% menjadi 6,32% mengalami kenaikan.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis pada PT. BPR Solider Marelan tahun 2019 dan 2020 tingkat NPL meningkat diakibatkan banyaknya jumlah nasabah yang meminjam. Meningkatnya jumlah nasabah yang meminjam pada PT. BPR Solider Marelan mengakibatkan total jumlah kredit macet juga meningkat setiap tahunnya bahwa sebagian nasabah mengalami proses kredit macet sehingga kesanggupan nasabah untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tidak berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa alasan yang dikemukakan nasabah. Misal, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, nasabah mengalami musibah seperti musibah bencana alam atau musibah berduka (kematian), sehingga nasabah tidak mampu membayar kredit.

Dapat juga terjadi karena pihak pegawai kurang memperhatikan penerapan penilaian kredit yang diukur dari *character, capacity, capital, colecterall*, dan *condition of economi* dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah. Untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. BPR Solider Marelان. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT SOLIDER MARELAN “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo mengemukakan bahwa tujuan penelitian adalah **“untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah”³**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان

³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**: Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta, 2019, hal.2

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan dapat membantu penulis untuk menambah wawasan mengenai sistem pengendalian intern pemberian kredit di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan dan saran yang dapat memberikan manfaat dalam mengelola sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit sehingga tujuan kreditnya dapat tercapai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti objek yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu jenis keuangan lembaga di Indonesia yang umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

Dalam buku Kasmir dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dalam pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dana (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*) dalam bentuk kredit serta memeberikan jasa-jasa lainnya. Hal yang paling sering dilakukan dalam dunia perbankan adalah perkreditan, simpan pinjam dana dan berbagai macam jasa lainnya.

⁴ Kasmir, **Pengantar Manajemen Keuangan**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 212

2.1.2 Fungsi Bank

Secara garis besar, fungsi utama dari bank adalah memberikan penghimpun dana serta penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat dengan tujuan pembiayaan.

Menurut buku Ismail, beliau mengemukakan fungsi bank sebagai berikut :

1. Sebagai penghimpun dana
2. Sebagai penyalur dana
3. Sebagai pelayanan jasa⁵

1) Sebagai Penghimpun dana

Penghimpun dana dapat diartikan sebagai penerimaan dana dari masyarakat luas untuk disimpan di bank. Bank akan membayar dengan jumlah tertentu atas penghimpun dana masyarakat yang besar himpunannya tergantung pada jenis simpanan.

2) Sebagai Penyalur Dana

Maksudnya adalah dana yang telah dikumpulkan oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, pembelian surat-surat berharga, dan pemilikan harta tetap dengan adanya jaminan berdasarkan syarat yang ditentukan guna pembiayaan usaha nasabah/peminjam. Kredit yang diberikan oleh bank tergantung kemampuan bank yang menyalurkannya.

⁵ Ismail, **Akuntansi Bank (Teori dan Aplikasi dalam Rupiah)**, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2014, hal. 12-14

3) Sebagai Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa bank adalah aktivitas pendukung yang dilakukan oleh bank dalam memperlancar usaha nasabah untuk melakukan transaksi di bank.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir Bank dibedakan menjadi :

1. **Dilihat dari Segi Fungsinya**
 - a. **Bank Umum**
 - b. **Bank Perkreditan Rakyat**
2. **Dilihat dari Segi Kepemilikannya**
 - a. **Bank Milik Pemerintah**
 - b. **Bank Milik Swasta Nasional**
 - c. **Bank Milik Koperasi**
 - d. **Bank Milik Asing**
 - e. **Bank Milik Campuran**
3. **Dilihat dari Segi Status**
 - a. **Bank Devisa**
 - b. **Bank Non Devisa**
4. **Dilihat dari Cara Menentukan Harga**
 - a. **Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional**
 - b. **Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah⁶**

2.2 Pemberian Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala

⁶ Kasmir, *Op. cit*, hal. 34

sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya disini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pastinya akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa bank yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam buku Kasmir menyatakan bahwa

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁷

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah **Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁸**

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dalam bukunya menyatakan bahwa **“kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk**

⁷ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi 1, Cetakan 13, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 85

⁸ *Ibid*, hal 85

melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat.

2.2.2 Tujuan Kredit

pemberian suatu fasilitas mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut buku Kasmir adalah sebagai berikut :

- 1. Mencari keuntungan**
- 2. Membantu usaha nasabah**
- 3. Membantu pemerintah¹⁰**

Dari tujuan utama pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi 1, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 163

¹⁰ Kasmir, *Op.Cit*, hal.88

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.3 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Resiko
- e. Balas jasa¹¹

Adapun penjelasan dari unsur-unsur kredit tersebut yaitu :

¹¹ Thamrin, *Op.Cit*, hal. 165

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit
- c. Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati
- d. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian waktu menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit
- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasinya kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan dalam jumlah tertentu. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri secara umum mengelompokkan jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. **Dilihat dari segi kegunaan**
2. **Dilihat dari segi tujuan kredit**
3. **Dilihat dari segi jangka waktu**
4. **Dilihat dari segi jaminan**
5. **Dilihat dari segi sektor usaha**¹²

1. Dilihat dari segi kegunaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya dapat diartikan sebagai kegunaan dana yang diberikan tersebut apakah digunakan sebagai pembukaan usaha kembali, dipakai untuk keperluan perorangan, atau sebagai kegiatan tambahan.

- a. Kredit investasi, yaitu biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lama.
- b. Kredit modal kerja, yaitu digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Menurut Untung dalam Setianingsih menyatakan bahwa kredit yang diberikan ada bermacam-macam jenis. Berdasarkan tujuan kreditnya dapat dibagi atas tiga macam sebagai berikut :

- a. **Kredit Produktif**
- b. **Kredit konsumtif**
- c. **Kredit perdagangan**¹³

¹² Thamrin, *Op. Cit*, hal. 169

¹³ Budi Untung. H, **Kredit Perbankan Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 7

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi.
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contohnya kredit ekspor impor

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Berdasarkan jangka waktunya diartikan sebagai lamanya pemberian kredit mulai dari awal hingga ke masa pelunasannya. Menurut Untung menyatakan bahwa jenis kredit berdasarkan jangka waktunya dibagi atas tiga yaitu:

- a. Kredit jangka pendek**
 - b. Kredit jangka menengah**
 - c. Kredit jangka panjang¹⁴**
- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan masa kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Contohnya: kredit modal kerja
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu masa kredit yang diberikan antara satu sampai dengan 5 tahun. Contohnya: kredit investasi
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu masa kredit yang diberikan paling lama diatas tiga atau lima tahun. Contohnya: kredit investasi atau KPR

¹⁴ *Ibid*, hal. 7

4. Dilihat dari segi jaminan

Berdasarkan jaminannya dapat diartikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank harus memiliki jaminan setidaknya senilai dengan jumlah kredit yang diberikan. Berdasarkan jaminannya, kredit dibagi atas dua jenis yaitu:

- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan harus memiliki jaminan tertentu. Jaminan tertentu dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud, dan memiliki nilai serendahny-rendahnya sama dengan jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank
- b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau jasa. Melainkan berdasarkan prospek usaha dan sifat loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Berdasarkan sektor usahanya, pemberian kredit dilakukan berbeda-beda tergantung karakteristik masing-masing dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan sektor usahanya kredit dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu :

- a. Kredit pertanian
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit industry
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit profesi
- f. Kredit perumahan

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, perusahaan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup kompleks, antara lain :

- a. Kepada siapa kredit itu diberikan
- b. Untuk obyek apa kredit itu diberikan
- c. Apakah calon debitur yang akan menerima kredit akan mampu mengembalikan hutang pokoknya ditambah bunga serta kewajibannya.
- d. Berapa jumlah (plafon maksimum kredit) yang layak diberikan
- e. Apakah kredit yang akan diberikan cukup aman atau risikonya kecil

Selain masalah-masalah umum yang harus dipecahkan oleh perusahaan dalam pemberian kredit yang juga dihadapkan pada masalah yang bersifat khusus yang menyangkut kegiatan usaha dari calon debitur secara spesifik. Sebab perkreditan mempunyai sifat kasusitis. Yang artinya masing-masing calon customer mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara meteril antara satu nasabah dengan nasabah lain.

Oleh karena itu antara satu nasabah dengan yang lain diperlukan adanya pendekatan dan penanganan yang berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri khusus dari usaha/pekerjaanya. Untuk itu perusahaan perlu mengetahui kriteria atau prinsip-prinsip pemberian kredit. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri menyatakan bahwa analisis penilaian kelayakan terhadap nasabah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C yaitu sebagai berikut :

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*¹⁵

Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dalam kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca/laporan rugi atau laba) dengan melakukan pengukuran

¹⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi 1, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 166

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sector masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha usaha sektor yang dijalankan.

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis penilai 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*¹⁶

Adapun penjelasannya prinsip pemberian kredit dengan metode 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

¹⁶ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.110

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan kredit hingga realisasi kredit. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit.

Menurut buku Kasmir mengemukakan bahwa **“tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak”**¹⁷. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.

Dalam buku Kasmir, tahapan-tahapan prosedur pemberian kredit secara umum yaitu :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara I
4. On the Spot
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana¹⁸

Adapun penjelasan tahapan-tahapan prosedur pemberian kredit yaitu :

¹⁷ *Ibid*, hal. 106

¹⁸ *Ibid*, hal. 115

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

- a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dll.
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara permohonan pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang bank inginkan.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka persiapkan adminitrasinya.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.3 Sistem Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Perusahaan menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam mencapai tujuan usaha. Adapun beberapa pengertian tentang pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Menurut Hery pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa ketentuan (peraturan)/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan¹⁹

Menurut Mulyadi sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

¹⁹ Hery, **Pengendalian Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Perneradamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 11

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan, fisik, dokumentasi, dan manusia.

Beberapa tujuannya, pengawasan (pengendalian) dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan akuntansi dan pengawasan manajemen.

- a. Pengawasan akuntansi dilakukan dengan menggunakan standar yang sudah biasa digunakan di dalam akuntansi, misalnya laba rugi biaya, perputaran aktiva, rasio keuangan, dan sebagainya. Pengendalian terhadap aktiva berujud lebih mudah dilakukan, misalnya dengan menyimpan di ruang yang dikunci, membuat catatan atas keluar masuknya aktiva, memberi tanda atau kode pada tiap barang atau aktiva. Pengawasan terhadap aktiva tidak berujud relatif lebih sulit, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan. Meningkatkan akurasi berbagai informasi yang disajikan oleh perusahaan juga penting. Informasi merupakan basis pembuatan keputusan oleh manajemen di dalam perusahaan dan pihak-pihak diluar perusahaan, seperti investor dan calon investor, pembeli dan calon pembeli, pemasok, relasi, dan pihak-pihak lain.
- b. Pengawasan manajemen adalah pengawasan yang bertujuan untuk : (1) meningkatkan efisiensi operasi perusahaan dan (2) meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Perusahaan

²⁰ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 163

dijalankan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar tujuan utama ini tercapai, manajemen menetapkan berbagai aturan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Agar berbagai pihak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen, perlu diterapkan suatu system pengendalian tertentu, yaitu pengendalian manajemen. salah satu bentuk pengendalian manajemen adalah adanya pelatihan atau penjelasan mengenai tujuan yang akan dicapai perusahaan kepada segenap karyawan dan jajaran manajemen.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam perkreditan, bank dituntut melakukan pengawasan atas tahap proses-proses pemberian kredit yang dilakukannya. Pengawasan kredit merupakan tahap lebih lanjut dari proses pemberian kredit dan merupakan upaya agar kredit yang telah dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono pengendalian/pengawasan kredit yaitu :

“Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya”²¹

Pengawasan/pengendalian kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan

²¹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, **Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal. 268

dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpanan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono sistem pengendalian intern perkreditan yaitu :

Sistem pengendalian intern perkreditan yang bertujuan mencapai portofolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat²²

Menurut Malayu S.P Hasibuan, pengendalian kredit yaitu :

“Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet”²³

2.3.3 Kriteria Pengendalian Intern Pemberian Kredit Yang Efektif

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern pemberian kredit menurut Tjukria P. Tawah (dalam skripsi Anderson Marbun) adalah :

- 1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan transaksi agunan**

²² Ibid, hal. 269

²³ Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 105

2. **Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari bebitur, konsentrasi kredit, dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya**
3. **Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya**
4. **Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan system yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya²⁴**

2.3.4 Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway* (COSO) sebagai proses yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan (*on going business activities*). Pengendalian internal terkait penjagaan asset dari pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi terhadap asset entitas sehingga dapat memberikan pengaruh atau efek yang material terhadap laporan keuangan.

²⁴ Anderson Marbun, Skripsi: **Peranan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (studi kasus pada koperasi simpan pinjam Artha Jaya Sentosa Jakarta)**, Universitas Widyatama, Bandung, 2006, hal. 39

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway* (COSO)

Mulyadi yang menyatakan bahwa unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah :

1. **Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**
2. **Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)**
3. **Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)**
4. **Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)**
5. **Pemantauan (*Monitoring*)²⁵**

Adapun penjelasan dari komponen-komponen pengendalian intern tersebut yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak atau suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, lingkungan pengendalian terdiri Faktor-faktor berikut :

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan direksi dan komisaris
- d. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- e. Struktur organisasi
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Proses mengidentifikasi dan menilai/mengukur resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengendalikannya, berikut ancaman penilaian resiko untuk mendesain pengendalian internal :

²⁵ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 183

- a. Tentukan ancaman yang mengadang BPR
- b. Perkirakan resiko, atau probabilitas, dari setiap ancaman yang muncul
- c. Kerugian potensial, dari setiap ancaman
- d. Identifikasi serangkaian pengendalian untuk melindungi terhadap ancaman
- e. Perkirakan biaya dan keuntungan dari pengadaan pengendalian
- f. Terapkan rangkaian pengendalian untuk melindungi terhadap ancaman

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data, aktivitas pengendalian umumnya termasuk ke dalam salah satu dari lima jenis aktivitas berikut, yaitu :

- a. Pemisahan tugas yang memadai
 - b. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas
 - c. Dokumentasi dan catatan yang memadai
 - d. Pengendalian fisik atas asset dan catatan-catatan
 - e. Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
- Dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi

yang terdiri dari cara-cara dan perekaman (*records*) guna mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utang perusahaan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari system tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu, metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup :

- a. Supervisi yang efektif
- b. Akuntansi pertanggungjawaban
- c. Audit intern

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian memaparkan mengenai hal apa saja yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, tujuan atau ukuran yang berbeda.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah sistem pengendalian intern atas prosedur keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelan, yang beralamat di Jl. Veteran No. 79, Pasar X, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20243. Subjek pada penelitian ini adalah PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelan.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan :

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah²⁶

²⁶ Moleong, Lexy J, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hal. 6

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, obsevasi langsung dan dokumen yang terkait. Penelitian ini difokuskan dalam kegiatan pengendalian intern atas keputusan pemberian kredit di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara peneliti kepada Personalia (HRD) dan Administrasi Kredit PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelان.

2. Data Sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo mengemukakan bahwa **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”²⁷**. Data sekunder dalam penelitian ini umumnya berupa bukti atau dokumen seperti struktur organisasi

²⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta, 2019, hal. 147

perusahaan, data jumlah pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode paling penting dalam penelitian dikarenakan tujuan pokok dari penelitian adalah memperoleh data dan informasi. Maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang memberikan pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkait.

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo mengemukakan bahwa **“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian”**²⁸. Teknik wawancara ini dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Dalam hal ini, penelitian akan melakukan wawancara kepada Personalia (HRD) dan Administrasi Kredit PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelan.

²⁸ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Op. Cit*, hal. 152

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian²⁹

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara dalam sebuah penelitian. Yang terkait langsung dengan penelitian ini yaitu dokumen struktur organisasi, data jumlah pemberian kredit, fungsi yang terkait dengan pemberian kredit dan dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

c. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku, jurnal serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti skripsi mengenai pemberian kredit, jurnal mengenai pengendalian intern kredit, undang-undang perbankan, buku system informasi akuntansi, buku perbankan mengenai buku system pengendalian internal dan lain sebagainya.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian yang merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemelihan dan pengumpulan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas individu atau kelompok untuk

²⁹ Sugiyono, *Loc. Cit*, hal 476

memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara yang berbentuk deskripsi atau gambaran yang mendalam tentang objek yang diteliti. Dalam metode analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat menarik kesimpulan dan gambaran umum mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan tentang bagaimana sistem pengendalian intern atas keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Solider Marelana.